

yang inherent dalam masyarakat yang tingkat fragmentasinya tinggi. **Kedua**, memerlukan adanya komitmen untuk memelihara kelangsungan sistem yang ada. Artinya para pemimpin haruslah mempunyai keinginan untuk mengubah adanya kemungkinan akan terjadinya disintegrasi dari sistem yang ada. **Ketiga**, adanya kemampuan untuk mengangkat persoalan antar subkultur masing-masing cleavages pada tingkat yang lebih tinggi (elit) dan yang **keempat**, adanya kemampuan untuk menempa untuk mencari penyelesaian yang tepat guna memenuhi tuntutan dari masing-masing subkultur, dengan ditemukannya aturan permainan yang jelas.

Ada beberapa alasan mengapa memilih bentuk demokrasi konsosiasional, (Affan Gaffar, 1988). **Pertama** untuk terciptanya demokrasi prosedural masih sangat sulit karena pranata sosial belum mendukungnya. Yakni misalnya adanya swasta yang kuat. **Kedua**, masyarakat Indonesia mempunyai tingkat fragmentasi dan polarisasi yang sangat tinggi, sehingga banyak mengalami konflik yang sangat sulit diatasi. **Ketiga**, harus memperhatikan politik kaum militer di Indonesia. Karena militer tidak mungkin menampakkan diri sebagai partai politik maka dukungan

militer terhadap Golkar akan tetap merupakan elemen yang dominan dalam Golkar. Dengan demikian hegemoni Golkar masih sulit untuk dapat dikurangi atau dihapuskan.

### KEHIDUPAN POLITIK RIIL

Masalah-masalah yang dihadapi demokrasi Pancasila sekarang dan mendatang akan lebih bersoal pada segi-segi praktis. Artinya suatu sistem akan disebut demokrasi dalam kehidupan politik riilnya. Demikian pula dengan praktek demokrasi Pancasila baru bisa disebut Pancasilais jika praktek politik seturut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Masalah-masalah yang dihadapi parpol dan peluang politiknya secara lebih luas diantaranya hubungan negara dengan kelompok dan masyarakat dalam konteks yang dialogis, perbedaan pendapat dan persepsi konflik keterbukaan sistem, sukseksi dan regenerasi dan kritik sosial.

Maka ada sejumlah peranan konstruktif yang dapat dimainkan, misalnya :

1. mendorong perkembangan politik yang secara utuh mengkonkretisasikan Demokrasi Pancasila.
2. menawarkan konvensi-konvensi baru yang konstitusional.
3. menganalisa ketidaklengkapan atau cacat perkembangan politik riil secara cermat dan tajam.